

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. BANK LIQUIDITY  
2. SEVERANCE PAY

KKK  
Per 45/00  
Tan  
P

**SKRIPSI**

**YAKOB TANDILOLO**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DI BANK YANG TERKENA LIKUIDASI**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**



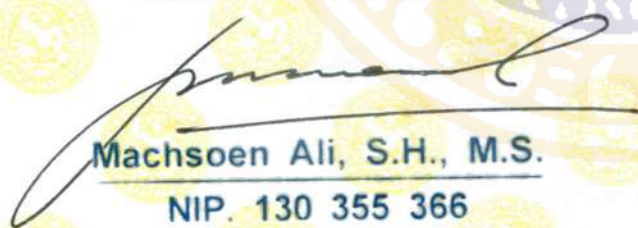
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DI BANK YANG TERKENA LIKUIDASI**

**SKRIPSI**


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

  
**Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
NIP. 130 355 366

Penyusun.

  
**Yakob Tandilolo**  
NIM. 039514231

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja dari 38 bank yang dilikuidasi sebagai akibat kebijakan ekonomi pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan nasional harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan penyelesaian perselisihan perburuan harus berdasarkan hukum yaitu: Undang-undang nomor 12 tahun 1964, Undang-undang nomor 22 tahun 1957 dan Permenaker nomor 3 tahun 1966.
- b. Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja maka dimulailah masa sulit bagi pekerja dan keluarganya karena bagi pekerja, pekerjaan tersebut seringkali merupakan satu-satunya sumber pendapatan atau mata pencaharian, untuk itu pemerintah dan pengusaha berkewajiban memberikan hak-hak pekerja yang meliputi uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian terhadap pekerja dari 38 bank yang dilikuidasi, apabila sudah ada putusan yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 12 tahun 1964 juncto Pasal 20 Permenaker nomor Per-03/MEN/1996.

#### **2. Saran**

- a. sebelum Pemerintah melikuidasi suatu bank maka harus dipikirkan secara matang akibat dari likuidasi bank tersebut, khususnya bagi pekerja yang kehilangan



pekerjannya, untuk itu pemerintah harus menyiapkan berbagai alternatif dalam rangka mengatasi masalah pengangguran yang dihadapi oleh pekerja dan berkewajiban untuk menyalurkan pekerja di bidang-bidang pekerjaan yang lain.

- b. Agar pemerintah merubah pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1996 yang mengatur tentang hak-hak pekerja yang meliputi uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

